



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.141, 2019

KEMENKEU. BLU. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI  
ENERGI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Nomor 2919/80/MEM.S/2018 tanggal 20 Juli 2018 hal Penyampaian Usulan Tarif Layanan BLU, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif pengujian;
- b. tarif layanan penunjang ; dan
- c. tarif perbantuan tenaga ahli.

Pasal 3

Tarif pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif laboratorium pengujian performa lampu hemat energi;
- b. tarif laboratorium pengujian keselamatan lampu hemat energi;
- c. tarif laboratorium pengujian performa *light emitting diode* (LED);
- d. tarif laboratorium pengujian keselamatan produk tusuk kontak, kotak dan kontak;
- e. tarif laboratorium pengujian keselamatan produk sakelar; dan
- f. tarif laboratorium kimia.

## Pasal 4

Tarif penunjang layanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, gedung, dan bangunan;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin; dan
- c. tarif jasa sertifikasi.

## Pasal 5

- (1) Tarif pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Pasal 6

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan bangunan dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

## Pasal 8

Tarif jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, tenaga ahli dan/atau harga

pasar.

#### Pasal 9

- (1) Tarif perbantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan kontrak antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak lain.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan pendidikan, pengalaman, jenis dan tingkat keahlian, dan/atau standar biaya yang ditetapkan oleh asosiasi jasa konsultan tenaga ahli di Indonesia, ditambah dengan margin untuk administrasi dan pengembangan yang besarnya paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan jasa layanan di bidang pengujian, penelitian, pengembangan, perekayasa teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang teknologi ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pengujian, penelitian, pengembangan, perekayasa teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang teknologi ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak lain.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap layanan kepada instansi pemerintah dan/atau mahasiswa dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada instansi pemerintah

dan/atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 13

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/PMK.05/2019

## TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN,  
ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI  
PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

## TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI  
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI  
ENERGI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Laboratorium Pengujian Performa Lampu Hemat Energi (*per contoh =maksimum 20 buah Lampu)		
	1. Uji Aging 100 jam untuk Lumen, Daya, <i>Correlated Color Temperature</i> (CCT)	Per Contoh	1.475.000,00 s.d 1.480.000,00
	2. Uji Lumen Maintenance 2000 jam	Per Contoh	2.570.000,00 s.d 2.700.000,00
	3. Uji Life Time atau Uji Umur Lampu 6000 jam	Per Contoh	6.100.000,00 s.d 6.500.000,00
	4. Uji Dimensi	Per Contoh	65.000,00
B.	Laboratorium Pengujian Keselamatan Lampu Hemat Energi	Per Contoh	167.000,00 s.d. 480.000,00

C.	Laboratorium Pengujian Performa <i>Light Emitting Diode</i> (LED) (*per contoh =maksimum 20 buah Lampu)		
	1. Uji Lumen, Daya, <i>Correlated Color Temperature</i> (CCT) pada 0 (nol) jam	Per Contoh	1.000.000,00 s.d 1.300.000,00
	2. Uji Lumen, Daya, <i>Correlated Color Temperature</i> (CCT) pada 1000 jam	Per Contoh	1.150.000,00 s.d 1.700.000,00
	3. Uji Lumen, Daya, <i>Correlated Color Temperature</i> (CCT) pada 2000 jam	Per Contoh	1.300.000,00 s.d 2.100.000,00
	4. Uji Lumen, Daya, <i>Correlated Color Temperature</i> (CCT) pada 3000 jam	Per Contoh	1.600.000,00 s.d 2.600.000,00
	5. Uji Lumen, Daya, <i>Correlated Color Temperature</i> (CCT) pada 4000 jam	Per Contoh	1.850.000,00 s.d 3.150.000,00
	6. Uji Lumen, Daya, <i>Correlated Color Temperature</i> (CCT) pada 5000 jam	Per Contoh	2.250.000,00 s.d 3.780.000,00
	7. Uji Lumen, Daya, <i>Correlated Color Temperature</i> (CCT) pada 6000 jam	Per Contoh	2.800.000,00 s.d 4.560.000,00
D.	Laboratorium Pengujian Keselamatan Produk Tusuk Kontak, dan Kotak Kontak (*per contoh = 20 buah)	Per Contoh	92.000,00 s.d 480.000,00
E.	Laboratorium Pengujian Keselamatan Produk Sakelar (*per contoh = 20 buah)	Per Contoh	92.000,00 s.d 480.000,00
F.	Laboratorium Kimia	Per Sampel	90.000,00 s.d 1.980.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI